

Manajemen Pendidikan Untuk Daerah Terpencil: Perbandingan Strategi Pemerataan Akses di Indonesia dan Malaysia

Multi

Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri
A.M Sangadji Ambon

Wany Nurhani

Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri
A.M Sangadji Ambon

Sri Narti Rabrusun

Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri
A.M Sangadji Ambon

Edi Ahyani

Universitas Islam Negeri A.M Sangadji Ambon

Abstrak. Pendidikan merupakan hak fundamental bagi setiap individu, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Namun, adanya batasan dalam akses dan infrastruktur kerap menjadi penghalang utama untuk mencapai pemerataan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi cara-cara pemetaan akses pendidikan di daerah terpencil di Indonesia dan Malaysia. Metodologi yang dipakai adalah studi kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang bersifat komparatif, yang menganalisis kebijakan pemerintah, program strategis, serta hasil pelaksanaan di kedua negara tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia menerapkan pendekatan yang berbeda dalam memetakan serta menjangkau daerah terpencil. Indonesia lebih mengedepankan penguatan basis data spasial dan kerjasama antar sektor, sedangkan Malaysia lebih memprioritaskan penerapan teknologi digital serta pengembangan infrastruktur yang berbasis komunitas. Kedua pendekatan memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan merata di semua wilayah, terutama bagi daerah yang kurang berkembang dan sangat sulit untuk dijangkau.

Kata Kunci : Pendidikan untuk daerah terpencil, perbandingan strategi, pemerataan akses Indonesia Dan Malaysia

Abstract. Education is a fundamental right for every individual, including those living in remote areas. However, limitations in access and infrastructure often pose a major barrier to achieving educational equity. This study aims to evaluate methods for mapping educational access in remote areas in Indonesia and Malaysia. The methodology used is a descriptive qualitative study with a comparative approach, analyzing government policies, strategic programs, and implementation outcomes in both countries. The research findings indicate that Indonesia and Malaysia implement different approaches to mapping and reaching remote areas. Indonesia prioritizes strengthening spatial databases and intersectoral collaboration, while Malaysia prioritizes the application of digital technology and community-based infrastructure development. Both approaches have their own advantages and challenges. The results of this study are expected to serve as considerations and references for policymakers in formulating more inclusive and equitable education policies across all regions, especially for less developed and difficult-to-reach areas.

Keywords: Education for remote areas, comparison of strategies, equitable access in Indonesia and Malaysia

Korespondensi: multi. Email: mutiyawagola@gmail.com

Pendahuluan

Pendidikan adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang dan wajib dipenuhi oleh negara, tanpa melihat latar belakang geografis, sosial, atau ekonomi. Namun, kenyataannya, memperoleh pendidikan yang berkualitas tetap menjadi masalah signifikan di banyak negara berkembang, terutama di daerah yang tergolong terpencil. Daerah terpencil biasanya mempunyai kondisi geografis yang sulit dijangkau, infrastruktur yang kurang memadai, dan sering kali terabaikan dalam perencanaan pembangunan (Fahrul et al., 2025). Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia berhadapan dengan tantangan serupa dalam menyediakan akses pendidikan yang merata hingga ke daerah jauh. Kedua negara ini memiliki keberagaman wilayah yang luas, baik dalam hal topografi maupun budaya, yang membuat penyediaan pendidikan di lokasi-lokasi terpencil menjadi semakin rumit. (Palguna & Atmaja, 2023)

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif (Judijanto & Caroline, 2025). Dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan kelompok etnis, masih banyak tempat di Indonesia yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak. Daerah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, serta sebagian besar pulau kecil di bagian timur Indonesia masih mengalami kesenjangan dalam hal jumlah sekolah ketersediaan tenaga pendidikan, dan fasilitas pendidikan lainnya. Kesulitan geografis yang ekstrim, seperti pegunungan, hutan yang lebat, dan lautan yang memisahkan pulau-pulau,

menjadi hambatan utama dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Selain itu, isu sosial seperti kemiskinan, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan, dan terbatasnya anggaran juga semakin memperburuk keadaan (Nabila et al., 2024).

Malaysia, meskipun memiliki luas wilayah yang lebih kecil daripada Indonesia, juga menghadapi tantangan yang sama, terutama di Sabah dan Sarawak di Kalimantan, serta komunitas Orang Asli di Semenanjung Malaysia (Lestari et al., 2024). Daerah ini sering kali tertinggal dalam hal pengembangan pendidikan jika dibandingkan dengan daerah perkotaan seperti Kuala Lumpur, Selangor, atau Penang. Ketidakseimbangan ini tidak hanya berkaitan dengan akses fisik ke sekolah, tetapi juga terkait dengan mutu pendidikan yang diterima oleh siswa. Pemerintah Malaysia telah melaksanakan berbagai langkah strategis untuk mengatasi ketidaksetaraan ini, termasuk melalui program digitalisasi pendidikan, pembangunan sekolah berbasis komunitas, dan penyediaan guru kontrak untuk wilayah pedalaman (Andika et al., 2025).

Salah satu metode yang krusial untuk memperluas akses pendidikan di daerah terpencil adalah melalui strategi pemetaan akses (Burhan et al., 2025). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengenali kebutuhan, tantangan, dan potensi yang ada di setiap wilayah sehingga intervensi kebijakan bisa lebih tepat sasaran. Pemetaan akses tidak hanya berfokus pada aspek geografis, melainkan juga mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi partisipasi dalam pendidikan. Dalam konteks ini, teknologi pemetaan

menggunakan data ruang (Sistem Informasi Geografis/GIS) berfungsi sebagai alat yang sangat berguna untuk menganalisis penyebaran fasilitas pendidikan, jarak yang harus ditempuh oleh siswa, serta kondisi infrastruktur jalan dan transportasi.

Di Indonesia, pemetaan akses pendidikan mulai diterapkan secara sistematis dalam beberapa tahun terakhir melalui kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah memproduksi platform seperti Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang berperan sebagai basis data nasional untuk mendukung kebijakan yang berbasis data (Yasin & Elsalina, 2025). Namun, penerapan teknologi ini masih menghadapi kendala, terutama dalam hal kapasitas teknis di daerah, kurangnya jaringan internet di wilayah terpencil, serta belum maksimalnya integrasi data antar institusi.

Sementara itu, Malaysia sudah terlebih dahulu memanfaatkan pendekatan berbasis data dalam perencanaan pendidikan. Kementerian Pendidikan Malaysia memakai sistem seperti EMIS (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan) untuk memantau dan mengevaluasi sekolah-sekolah di seluruh negara (Daud & Saad, 2013). Selain itu, inisiatif seperti "Zon Amanah Pendidikan" dan "Sekolah Transformasi" diberlakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah yang tertinggal. Pemerintah juga melibatkan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah untuk mempercepat akses pendidikan yang lebih merata. Dalam hal pemetaan akses, Malaysia telah menggabungkan

data geografis dan demografis untuk menentukan lokasi yang menjadi prioritas dalam pembangunan sekolah dan penempatan guru.

Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dalam strategi pemetaan akses pendidikan menjadi penting untuk dianalisis, karena dapat memberikan wawasan yang luas mengenai praktik terbaik yang bisa diadopsi sesuai dengan konteks lokal masing-masing negara (Nelta & Dias, 2024). Selain itu, pemahaman mengenai kelebihan dan kekurangan dari setiap pendekatan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien di masa depan. Misalnya, jika Malaysia lebih sukses dalam memanfaatkan data spasial untuk merancang zonasi pendidikan yang inklusif, maka Indonesia dapat belajar dari aspek tersebut dan menyesuaikannya dengan kompleksitas geografis yang ada.

Kebutuhan untuk penelitian ini semakin mendesak mengingat pentingnya pendidikan sebagai dasar pembangunan berkelanjutan. Tanpa akses pendidikan yang setara dan berkualitas di semua daerah, usaha untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mempererat kohesi sosial akan sulit dicapai. Oleh karena itu, studi yang mendalam mengenai strategi pemetaan akses pendidikan di daerah terpencil tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi pengambil kebijakan.

Dengan memperhatikan berbagai dinamika tersebut, latar belakang ini menjadi landasan penting untuk melakukan analisis perbandingan strategi pemetaan akses

pendidikan antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam pengembangan pendekatan yang lebih responsif, inklusif, dan berdasarkan data dalam merancang intervensi pendidikan di daerah-daerah terpencil. Akhirnya, tujuan utama dari seluruh upaya ini adalah memastikan bahwa tidak ada anak yang terabaikan dalam memperoleh haknya atas pendidikan yang berkualitas, di lokasi manapun mereka berada.

Metode Penelitian

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian berjudul “Pendidikan untuk Daerah Terpencil: Perbandingan Strategi Pemetaan Akses di Indonesia dan Malaysia” mengadopsi pendekatan kualitatif dengan rancangan studi yang bersifat komparatif (Darmalaksana, 2020). Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi yang digunakan oleh kedua negara dalam menanggulangi masalah akses pendidikan di wilayah terpencil. Dengan membandingkan dua negara yang memiliki latar belakang geografis dan kebijakan yang berbeda, namun masih dalam satu rumpun, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan praktik terbaik dan hambatan yang dihadapi masing-masing negara.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dan pengumpulan dokumen dari berbagai sumber resmi, seperti laporan pemerintah, jurnal akademik, kebijakan pendidikan nasional, serta publikasi dari institusi internasional. Di samping itu, data primer juga diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan berbagai pemangku kepentingan dalam

sektor pendidikan, seperti pejabat di dinas pendidikan, guru yang mengajar di daerah terpencil, serta perwakilan LSM yang aktif dalam program akses pendidikan. Wawancara dilaksanakan secara daring maupun tatap muka, tergantung pada lokasi dan kesiapan responden.

Proses analisis data menggunakan teknik analisis tematik (Adelliani et al., 2023), yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menemukan pola, perbedaan, dan kesamaan dalam strategi yang diterapkan di Indonesia dan Malaysia. Analisis ini berfokus pada aspek kebijakan, penggunaan teknologi, infrastruktur pendidikan, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung akses pendidikan. Sementara itu, faktor geografis dan sosial budaya juga dianalisis untuk menilai dampaknya terhadap efektivitas strategi yang diterapkan.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode (Susanto & Jailani, 2023), yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari dokumen dengan hasil wawancara untuk memastikan adanya konsistensi dan akurasi dalam temuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan sesuai konteks, serta memperkaya pemahaman tentang pendidikan di daerah terpencil melalui pendekatan perbandingan antar negara.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan untuk Daerah Terpencil: Perbandingan Strategi Pemetaan Akses di Indonesia dan Malaysia adalah sebuah studi yang mengeksplorasi bagaimana Indonesia dan Malaysia merancang serta melaksanakan rencana

untuk memastikan bahwa masyarakat di lokasi-lokasi terpencil mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap layanan pendidikan.

Topik ini menyoroti usaha pemerataan akses pendidikan, yang melibatkan pengidentifikasian lokasi-lokasi yang terasing dan memerlukan bantuan dalam pendidikan, serta menganalisis kebijakan atau strategi yang diterapkan oleh kedua negara untuk menghadapi tantangan yang berkaitan dengan faktor geografis, infrastruktur, sumber daya manusia, dan aspek sosial-budaya yang menghalangi akses pendidikan.

1. Pendidikan untuk daerah terpencil

Pendidikan bagi daerah terpencil adalah usaha untuk menyediakan layanan pendidikan yang ditargetkan pada lokasi-lokasi yang sulit dijangkau secara geografis, seperti daerah pedalaman, pegunungan, pulau kecil, dan area perbatasan. Tempat-tempat ini seringkali menghadapi berbagai rintangan, seperti minimnya infrastruktur, akses transportasi yang sulit, kekurangan tenaga pendidik, dan kurangnya sarana belajar yang memadai. Karena itu, pendidikan untuk daerah terpencil tidak hanya mencakup penyediaan sekolah, tetapi juga membangun sistem yang dapat memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat di kawasan tersebut.

Tujuan fundamental dari pendidikan di lokasi terpencil adalah memastikan setiap anak, tanpa memperhatikan lokasi tempat tinggal, memiliki hak yang setara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Pendidikan menjadi kunci untuk membuka

lebih banyak peluang dalam kehidupan, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan komunitas setempat. Dalam praktiknya, pendidikan di daerah terpencil seringkali memerlukan pendekatan yang berbeda, seperti mengimplementasikan sistem sekolah yang berfokus pada komunitas, memanfaatkan teknologi pendidikan jarak jauh, atau mengirimkan guru-guru terlatih yang siap menghadapi tantangan khusus di lapangan.

Lebih dari itu, pendidikan untuk daerah terpencil juga sangat terkait dengan pembangunan secara keseluruhan di wilayah tersebut. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, masyarakat lokal dapat berperan aktif dalam proses pembangunan, menjadi lebih mandiri, dan tidak lagi tertinggal dibandingkan daerah lain. Untuk itu, dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang merata dan inklusif di seluruh pelosok negeri (Anggraeni & Poerwanti, 2016).

2. Strategi Pemerataan Akses Pendidikan di Indonesia

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Melalui pendidikan yang berkualitas, sumber daya manusia dapat dikembangkan dengan baik, sehingga mampu berkontribusi dalam memajukan bangsa. Namun, di Indonesia, pemerataan pendidikan masih menjadi masalah yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius.

Pemerataan pendidikan adalah upaya untuk menyediakan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas bagi semua warga negara Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, agama, suku, atau daerah tempat tinggal. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan

Salah satu tantangan utama dalam pemerataan pendidikan adalah kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sebagian besar sekolah berkualitas tinggi terletak di kota-kota besar, sementara daerah pedesaan masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini menyebabkan kesenjangan kualitas pendidikan antara anak-anak di perkotaan dan pedesaan semakin melebar.

Selain itu, kesenjangan juga terjadi dalam hal aksesibilitas pendidikan. Banyak anak di daerah terpencil atau terisolasi sulit untuk mengakses sekolah karena jarak yang jauh atau infrastruktur yang tidak memadai. Kondisi ini membuat mereka sulit mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga berpotensi menjadi generasi yang terpinggirkan dan sulit berkembang.

Selain kesenjangan geografis, pemerataan pendidikan juga terkendala oleh faktor ekonomi. Banyak keluarga miskin atau berpenghasilan rendah yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Beban biaya pendidikan yang tinggi, seperti biaya sekolah, buku, seragam, dan transportasi, menjadi hambatan bagi mereka

untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Akibatnya, anak-anak dari keluarga miskin sering kali terpaksa putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang memadai.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil dan miskin. Dana yang cukup akan memungkinkan pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan laboratorium. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan bantuan keuangan kepada keluarga miskin agar anak-anak mereka tetap dapat bersekolah

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik di daerah pedesaan. Melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme, guru-guru di daerah terpencil dapat memberikan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah juga harus mendorong mutasi guru dari daerah perkotaan ke pedesaan untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar.

Selain upaya dari pemerintah, partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Masyarakat dapat terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan di daerah mereka. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan dukungan moral dan motivasi kepada anak-anak untuk terus belajar dan mengembangkan potensi mereka.

Pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia bukanlah tugas yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk dicapai. Dengan adanya komitmen dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan, diharapkan pemerataan pendidikan dapat terwujud. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, dan hal ini merupakan investasi yang penting bagi masa depan bangsa (Hakim, 2016).

3. Strategi Pemerataan Akses Pendidikan di Malaysia

Strategi pemerataan akses pendidikan di Malaysia mencakup berbagai upaya untuk memastikan semua warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Ini termasuk peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, penyediaan beasiswa dan bantuan keuangan, serta pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan pendidikan.

Malaysia, di sisi lain, telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemerataan pendidikan. Sistem pendidikan di negara ini lebih terintegrasi dengan upaya pemerintah dalam menyamaratakan akses di seluruh wilayah.

Program wajib belajar di Malaysia yang meliputi jenjang dasar hingga menengah berhasil meningkatkan angka partisipasi anak-anak dalam pendidikan. Hal

ini didukung oleh alokasi anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan modernisasi fasilitas sekolah. Kemajuan memengaruhi sistem Pendidikan teknologi di kedua negara. Malaysia dianggap lebih maju dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses belajar-mengajar. Pemerintah Malaysia secara aktif mendukung digitalisasi pendidikan, mulai dari pengadaan perangkat hingga pelatihan guru dalam menggunakan teknologi di kelas.

Dari segi kurikulum, Indonesia mengadopsi Kurikulum Merdeka yang menekankan pada kreativitas siswa, pembelajaran berbasis proyek, dan pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis dan kolaborasi. Di Malaysia, pendekatan kurikulum lebih terfokus pada STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika) serta standar pendidikan berbasis kompetensi. Kedua pendekatan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global (Supianto et al., 2023).

4. Perbandingan Sistem pendidikan antara Indonesia dan Malaysia

Sistem pendidikan di Indonesia dan Malaysia memiliki sejumlah kemiripan, tetapi juga terdapat perbedaan yang jelas dalam aspek struktur, kurikulum, dan metode pembelajaran. Kedua negara menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dan telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan seiring dengan perubahan zaman.

Dalam konteks Indonesia, sistem pendidikan dibagi menjadi tiga level utama: pendidikan dasar (SD dan SMP), pendidikan menengah (SMA/SMK), dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar dimulai pada usia tujuh tahun dengan wajib belajar selama sembilan tahun, meskipun saat ini pemerintah mendorong program belajar wajib selama 12 tahun.

Kurikulum di Indonesia terus diperbaharui untuk memenuhi tuntutan abad ke-21, seperti Kurikulum Merdeka yang lebih fokus pada pengembangan belajar berbasis proyek dan pengembangan karakter siswa. Sebaliknya, Malaysia memiliki sistem pendidikan yang lebih terstruktur, yang terdiri dari pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar di Malaysia dimulai pada usia enam tahun dan juga diwajibkan selama enam tahun (Syakhrani et al., 2022).

Negara ini menekankan penggunaan dua bahasa utama dalam pendidikan, yaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggris, yang membantu penguasaan bahasa global. Pemerintah Malaysia juga menerapkan kurikulum nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan internasional, serta memberikan fokus pada STEM (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Teknik, dan Matematika).

Perbedaan signifikan lainnya dapat ditemukan dalam manajemen pendidikan. Malaysia menerapkan sistem yang lebih terpusat dan distandarisasi oleh

Kementerian Pendidikan, sedangkan Indonesia, meski dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan otonomi yang lebih besar pada tingkat daerah, sehingga implementasi kebijakan dapat bervariasi tergantung pada lokasi.

Dalam hal kualitas, Malaysia umumnya lebih baik dalam infrastruktur pendidikan dan fasilitas sekolah, sementara Indonesia memiliki keunggulan dalam banyaknya lembaga pendidikan dan ragam budaya yang memperkaya sistem pendidikannya. Keduanya tetap dihadapkan pada tantangan seperti kesenjangan pendidikan antara kawasan perkotaan dan pedesaan, serta peningkatan mutu guru (Ahyani & Saimima, 2023).

Secara total, baik Indonesia maupun Malaysia terus berusaha menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, relevan, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Dengan saling belajar satu sama lain, kedua negara ini dapat saling memperkaya pengalaman dan memperkuat sistem pendidikan nasional mereka masing-masing.

Berikut adalah perbandingan sistem pendidikan antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk poin:

a. Struktur Sistem Pendidikan

1) Indonesian

- Pendidikan Dasar: 6 tahun SD + 3 tahun SMP
- Pendidikan Menengah: 3 tahun SMA/SM
- Pendidikan Tinggi: D3/S1, S2, S3

2) Malaysia:

- Pendidikan Dasar: 6 tahun Sekolah Rendah
 - Pendidikan Menengah: 5 tahun Sekolah Menengah Bawah + 2 tahun Pra-Universitas (Form 6 atau Matrikulasi)
 - Pendidikan Tinggi: Diploma, Sarjana, Pascasarjana
- b. Kurikulum
- 1) Indonesia:
 - Menggunakan Kurikulum Merdeka (terbaru), dengan pendekatan berbasis kompetensi dan proyek.
 - 2) Malaysia:
 - Menggunakan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM), dengan fokus pada nilai dan penguasaan keterampilan.
- c. Bahasa Pengantar
- 1) Indonesia: Bahasa Indonesia
 - 2) Malaysia: Bahasa Melayu, namun di sekolah swasta/internasional bisa menggunakan Bahasa Inggris atau Mandarin
- d. Ujian Nasional
- 1) Indonesia:
 - Ujian nasional telah dihapus, diganti dengan asesmen nasional dan ujian sekolah
 - 2) Malaysia:
 - Masih menggunakan ujian seperti UPSR (sekarang dihapus), PT3 (dihapus), SPM (Sijil Pelajaran Malaysia), dan STPM (untuk pra-universitas)
- e. Pendidikan Agama
- 1) Indonesia: Pendidikan agama diberikan sesuai agama siswa
 - 2) Malaysia: Pendidikan Islam dominan di sekolah negeri; non-Muslim mendapat pelajaran moral atau agama lain
- f. Sistem Zonasi Sekolah
- 1) Indonesia: Sistem zonasi diterapkan dalam PPDB untuk pemerataan akses pendidikan
 - 2) Malaysia: Menggunakan sistem zonasi tapi lebih fleksibel dengan banyak sekolah berbasis etnis dan agama
- g. Pendidikan Swasta dan Internasional
- 1) Indonesia: Banyak sekolah swasta dan internasional di kota besar
 - 2) Malaysia: Sekolah swasta dan internasional sangat berkembang, termasuk sekolah berbasis etnis (Cina, Tamil)
- h. Anggaran dan Kualitas Pendidikan
- 1) Indonesia: Anggaran pendidikan 20% dari APBN, namun tantangan masih pada pemerataan dan mutu
 - 2) Malaysia: Anggaran pendidikan cukup besar dengan kualitas pendidikan yang cenderung lebih merata
- Kesimpulan**
- Pendidikan di wilayah terpencil merupakan tantangan signifikan bagi Indonesia

serta Malaysia, mengingat keadaan geografis, terbatasnya infrastruktur, dan distribusi penduduk yang tidak merata. Melalui analisis perbandingan mengenai strategi pemetaan akses pendidikan di kedua negara, dapat disimpulkan bahwa meskipun dihadapkan pada tantangan serupa, pendekatan yang diterapkan menunjukkan perbedaan yang cukup jelas. Indonesia, dengan jumlah pulau yang banyak dan luas wilayah, bergantung pada pemetaan yang didasarkan pada data spasial serta kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah untuk menentukan prioritas dalam pembangunan sekolah dan penempatan guru.

Sebaliknya, Malaysia menerapkan strategi yang lebih terpusat dan terintegrasi, dengan penekanan pada penggunaan teknologi digital dan jaringan pendidikan pintar yang menjangkau hingga daerah pedalaman. Kedua negara menunjukkan bahwa strategi pemetaan akses yang efisien harus memperhitungkan faktor-faktor lokal, seperti keadaan geografis, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Kerjasama antar lembaga, dukungan dari kebijakan pemerintah, serta pemanfaatan teknologi menjadi elemen kunci dalam memperluas akses pendidikan secara merata.

Dengan berkelanjutan melakukan inovasi dan pertukaran pengetahuan antarnegara, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki kesempatan besar untuk saling belajar dan meningkatkan sistem pendidikan mereka, terutama dalam memastikan hak pendidikan yang setara untuk seluruh warga negara, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Referensi

- Adelliani, N., Sucirahayu, C. A., & Zanjabila, A. R. (2023). *Analisis tematik pada penelitian kualitatif*. Penerbit Salemba.
- Ahyani, E., & Saimima, M. S. (2023). Implementasi Manajemen Perkantoran Berbasis Budaya Mutu Dalam Mewujudkan Lembaga Pendidikan Islam Unggul. *Jurnal Visionary: Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 11(1), 45–53.
- Andika, W., Mendrofa, R., Ervilia, S., Widiyanto, T., Sinaga, R., Surbakt, T. I. P., & Ash-Shiddiqy, A. R. (2025). Analisis Perkembangan Kebijakan Teknologi Mendukung Pendidikan di Indonesia dan Malaysia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 369–382.
- Anggraeni, N., & Poerwanti, E. (2016). Analisis Tingkat Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Di Sekolah Daerah Terpencil Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 4(2).
- Burhan, B., Busnawir, B., & Pugu, M. R. (2025). Kebijakan Pemerataan Guru dan Kualitas Pendidikan di Daerah Terpencil. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(1), 253–263.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Daud, E. D. C., & Saad, A. (2013). Sistem Maklumat Pengurusan dalam talian di sekolah dalam konteks Malaysia. *Seminar Kebangsaan ICT Dalam Pendidikan, Malaysia*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/314283785>.
- Fahrul, F. P. S., Waliulu, H., & Sugi, L. (2025).

Manajemen Manajemen Strategi Sekolah Unggul Di Daerah Tertinggal: Studi Kasus Sekolah Pusat Keunggulan SMK Muhammadiyah Ambon: Manajemen strategi, pusat keunggulan, pendidikan vokasi, daerah tertinggal, SWOT, SMK Muhammadiyah Ambon.

Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1).

Judijanto, L., & Caroline, C. (2025). Strategi Pendidikan Inklusif: Studi Literatur tentang Upaya Mengatasi Kesenjangan Pendidikan di Berbagai Negara. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(1), 10–25.

Lestari, D. R. P., Istiq'faroh, N., & Muhimmah, H. A. (2024). Studi Perbandingan Sistem Pendidikan di Indonesia dengan Malaysia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3), 1442–1454.

Nabila, P., Tinendung, H. F., Kurniasih, L., Efendi, M. T., Hasibuan, T., & Yusnaldi, E. (2024). Pengaruh Kondisi Geografis Terhadap Pendidikan Dasar Di Indonesia: Studi Literatur Pada Pendidikan SD/MI. *Widya Balina*, 9(2), 193–201.

Nelta, S. P., & Dias, A. J. (2024). Perbandingan

Sistem Pendidikan di Indonesia dan Pendidikan di Malaysia. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan* | E-ISSN: 3062-7788, 1(3), 49–61.

Palguna, I. D. G., & Atmaja, B. K. D. (2023). Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 350–370.

Supianto, S., Marmoah, S., Poerwanti, J. I. S., Istiyati, S., Mahfud, H., & Sukarno, S. (2023). A comparative study of education equity policy in remote areas in Indonesia and Malaysia. *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 19(2), 125–134.

Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61.

Syakhriani, A. W., Fathiyah, F., Janah, F., & Fauziyyah, F. (2022). Sistem Pendidikan Di Negara Malaysia. *Educational Journal: General and Specific Research*, 2(2), 320–327.

Yasin, N. A., & Elsalina, F. E. (2025). Optimizing the Use of the Dapodik Application in School Data Synchronization to Improve the Efficiency of Education Management. *Insights: Journal of Primary Education Research*, 2(1), 90–100.